FOTO-FOTO: AJI PUTRA/JAWA POS RADAR MAGETAN

AKSI: Ratusan mahasiswa PMII Magetan berunjuk rasa di depan DPRD Magetan, Senin (1/9), menyuarakan kritik atas kebijakan pemerintah daerah.

MAHASISWA TUNTUT DPRD TEGAS

Kritisi Kebijakan Pengadaan Mobil Dinas

KOTA, *Jawa Pos Radar Magetan* – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Magetan dan STAI Ma'arif berunjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Polres Magetan, kemarin (1/9). Aksi bertajuk Magetan Bersuara Rakyat Lapar itu diikuti sekitar 150 mahasiswa.

Massa menyuarakan keresahan rakyat sekaligus mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil. "Negara kita tidak baik-baik saja. Apa yang perlu disampaikan harus dilakukan bersama-sama," ujar Ketua Umum PC PMII Magetan, Luqman Hakim.

Dalam orasinya, mahasiswa menuntut DPRD menyampaikan aspirasi ke DPR RI. Mereka mendesak reformasi politik, menolak tindakan represif, hingga meminta pengawasan terhadap pemerintah terkait perlindungan demokrasi dan HAM. Tuntutan lain, pengendalian inflasi, stabilitas harga bahan pokok, penciptaan lapangan kerja, hingga percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Mahasiswa juga menyoroti pengadaan mobil dinas senilai Rp 2,2 miliar di 100 hari kerja pertama bupati dan wakil bupati. "Kami menilai kebijakan itu mencederai rasa keadilan masyarakat," tegas Luqman.

Ketua DPRD Magetan Suratno mengapresiasi aksi mahasiswa yang berlangsung humanis. Ia menjelaskan pengadaan mobil dinas sudah dianggarkan sebelumnya. "Hal itu akan menjadi catatan bagi kami. Terima kasih atas kritik yang membangun," katanya.

Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro menambahkan aspirasi mahasiswa selaras dengan visi misi pemkab. "Semua poin sudah masuk dalam penyusunan RPJMD," ujarnya. **(ril/her)**